

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL DAN WORKSHOP
PERBENIHAN DAN KELEMBAGAAN
Yogyakarta, 10-11 November 2008

Peran Perbenihan Dan Kelembagaan Dalam Memperkokoh Ketahanan Pangan



FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
FORUM PERBENIHAN KOMDA DIY
2008

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL DAN WORKSHOP
PERBENIHAN DAN KELEMBAGAAN

Dalam Yogyakarta, 10-11 November 2008

Peran Perbenihan Dan Kelembagaan Dalam Memperkokoh Ketahanan Pangan

**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
FORUM PERBENIHAN KOMDA DIY
2008**

PROSIDING

Seminar Nasional dan Workshop Perbenihan dan Kelembagaan Yogyakarta 10-11 November 2008

Tema:

**Peran Perbenihan dan Kelembagaan
Dalam Memperkokoh Ketahanan Pangan**

Penyelenggara

Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Nasional (UPN) "Veteran" Yogyakarta
Forum Perbenihan DIY

Penyunting

Dr. Ir. H. Basuki, MP, Dr. Ir. Teguh Kismantoroedji, MS, Ir. Hj. Ami Suryawati, MP,
Ir. Vandrias Dewantoro, M.Si, Ir. Lagiman, M.Si, Vini Arumsari, SP., MP,
Wulandari Dwi Etika Rini, SP., M.P, Eko Murdiyanto, SP., M.Si,
Endah Wahyurini, SP., M.Si, Antik Suprihanti, SP., M.Si, Ir. Nurngaini, MP

Desain Cover:

Panitia Seminar Nasional dan Workshop Perbenihan dan Kelembagaan

Percetakan

HANGGAR Offset, Yogyakarta

Cetakan I / November 2008

Penerbit

Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Nasional (UPN) "Veteran" Yogyakarta

Jl. SWK 104 (Lingkar Utara), Condong Catur, Yogyakarta 55283

Telp: (0274) 486693, 487793; Fax. (0274) 487793

e-mail : semnas_benihlembaga_fpupn@yahoo.com

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Ucapan Terima Kasih	ii
Sambutan Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta	iii
Sambutan Ketua Panitia	v
Daftar Isi	vi

I. Makalah Utama

Peran Perbenihan dan Kelembagaan dalam Memperkokoh Ketahanan Pangan (Menteri Pertanian RI)	1
Peran kelembagaan perbenihan dalam rangka penyediaan dalam rangka penyediaan benih unggul bermutu tepat sasaran (Prpto Yudono)	5
Dari desentralisasi perbenihan membangun industri unit desa menuju terbentuknya desa industri berbasis pertanian industri (Sjamsoe'oed. S)	13
Peran perbenihan dan kelembagaan dalam memperkokoh ketahanan pangan (Atmadi Saleh)	17
Peran perbenihan dan kelembagaan dalam memperkokoh ketahanan pangan (Didi Junaedi)	20

II. Makalah Workshop

Penguatan organisasi dan manajemen petani sebagai pebisnis di pedesaan dalam mendukung peningkatan produksi pertanian (Soeharto)	1
Peran Perguruan Tinggi dalam perbaikan sistem perbenihan nasional (Sumarwoto dan Ami Suryawati)	13
Membangun sistem perbenihan kedelai dengan pendekatan " Supply Chain Management (Facrul Rozi)	20
Evaluasi kinerja sistem perbenihan (Satrias Ilyas, Memen Surahman, Suwanto, Sri Yani Sujiprihati, Yan Rahman Hidayat, dan Adi Wijono)	32

Kajian Agribisnis perbenihan padi varietas unggul baru di tulang bawang BPTP- Lampung (Yulia Pujiharti dan Nina Mulyanti)	22
Peran kelembagaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani untuk menunjang pembangunan pertanian (Budi Widayanto)	31
Potensi petani dalam agribisnis bibit hortikultura (studi kasus pendirian koperasi bibit Mekar Buana) (Seno Basuki dan Endang Iriani)	38
Pengembangan model sistem kelembagaan agribisnis petani kakao di kabupaten Kulon Progo (Budiarto)	46
Memperkuat kelembagaan pangan rumah tangga tani di Kecamatan Tepos kabupaten Gunung Kidul (Indah Widowati)	53
Peran Kelembagaan OPPA di daerah irigasi sumur dalam untuk meningkatkan ketahanan pangan di kabupaten Gunung Kidul DIY (Vandrias Dewantoro)	59
Kajian pengembangan usaha perbenihan ubi jalar di kabupaten Batang dalam upaya mendukung ketahanan pangan (Indrie Ambarsari dan Abdul Choliq)	67
Kerjasama PT. Sang Hyang Seri dengan kelompok tani penangkar dalam memproduksi benih padi (Siti Hamidah)	75
Kontribusi kelembagaan local dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa bagi terwujudnya ketahanan pangan (Tuti Susilowati)	80
Kerjasama kemitraan PT. PERTANI dengan kelompok tani dalam penyediaan bahan baku benih bersertifikat untuk menunjang ketahanan pangan (Wulandari Dwi Etika Rini, Vini Arumsari)	89
Problema ketersediaan dan agribisnis perbenihan padi di kabupaten Bantul (Teguh Kismantoroadjji)	101
Evaluasi sistem pemanenan padi dalam menunjang perbenihan di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (Heni Purwaningsih, Mahargono Kobarsih, Rob Musdjisihono)	108
Penggunaan tenaga kerja luar keluarga pada usaha tani tanaman pangan menurut kelembagaan lahan dan tenaga kerja di kabupaten Gunung Kidul (Suwarto)	118

**PERAN KELEMBAGAAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PETANI
UNTUK MENUNJANG PEMBANGUNAN PERTANIAN**

**THE ROLE OF INSTITUTIONAL TO INCREASE WELFARE COMMUNITIES FARMER
TO SUPPORT THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL**

BUDI WIDAYANTO

Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian UPN "Veteran" Yogyakarta

ABSTRACT

The failure of agricultural orientation can be shown by the weakness of farmer as a social capital. The weakness indicated from the decrease of welfare and the gap of the social relationship pattern of farmer. To overcome this condition, it needs fundamental effort to increase dignity, empowerment, and the farmer's freedom to reach development of agricultural success.

The success of agricultural development must be placed the farmer as a social capital in agricultural industry relation that more egalitarian. This effort can be achieved by increasing the role of local institution or new institution, so the farmer belong good bargaining position equal with their contribution.

Keywords: Institutional, welfare, development of agriculture.

PENDAHULUAN

Orientasi pembangunan pertanian didasarkan dua kepentingan utama, yaitu peningkatan produksi guna mencukupi kebutuhan pangan secara nasional dan peningkatan kesejahteraan petani sebagai pelaku kegiatan produksi pertanian. Kedua orientasi tersebut belum tercapai, kecukupan pangan secara nasional belum mantap, hal ini dapat dilihat adanya kecenderungan import untuk beberapa komoditas pangan setiap tahun. Sedangkan tingkat kesejahteraan menunjukkan kondisi yang semakin tidak menentu dan petani semakin kesulitan dalam menentukan pilihan-pilihan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya (kemiskinan di perdesaan, rendahnya Nilai Tukar Petani, pemilikan sumberdaya yang semakin menurun, dan akses terhadap sumberdaya penunjang yang terbatas).

Tabel 1. Posisi Impor Pangan Indonesia Terhadap Dunia

No	Komoditas	Rata-rata 5 tahun terakhir (ribu ton)	Posisi	Importir terbesar dunia
1	Beras	437,99	13	Nigeria
2	Jagung	962,24	22	Jepang
3	Kedelai	1.180,55	11	Cina
4	Daging	13,60	33	Amerika Serikat
5	Gula	822,76	2	Belgia

Sumber: FAO dalam Achmad Suryana (2008)

Untuk mengatasi fenomena ketidakcukupan pangan dapat dilakukan dengan kebijakan impor sehingga tercapai stabilitas/keamanan pangan nasional, meskipun dalam jangka panjang dapat mengganggu kedaulatan pangan, sehingga kebijakan impor secara bertahap harus dikurangi dengan

meningkatkan produksi dalam negeri. Sedangkan fenomena keterpurukan tingkat kesejahteraan petani tidak semudah hasilnya dengan berbagai kebijakan melalui program-program pembangunan. Hal ini dapat dilihat pada kondisi masyarakat petani yang cenderung komitmen dan loyalitasnya semakin menurun. Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan dewasa ini bahwa petani semakin berlaku negatif dalam mengeluarkan aspirasinya (beberapa kasus petani cenderung memberontak menuntut haknya).

Tabel 2. Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 1996-2006

No	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (juta)		
		Kota	Desa	Kota+Desa
1	2000	12,30	26,40	38,70
2	2001	8,60	29,30	37,90
3	2002	13,30	25,10	38,40
4	2003	12,20	25,10	37,30
5	2004	11,40	24,80	36,10
6	2005	12,40	22,70	35,10
7	2006	14,49	24,81	39,30

Kondisi ini diperburuk dengan adanya intensitas kapitalisasi dan politisasi program di wilayah perdesaan yang mayoritas adalah masyarakat pertanian. Hal ini mengakibatkan kesulitan petani pada pilihan-pilihan untuk meningkatkan kesejahteraannya, sehingga pilihan masyarakat tani cenderung bersifat instan dan pertanian secara umum kehilangan kulturnya. Berbagai kasus yang terjadi di berbagai daerah, seperti Padi Super Toy, Padi MSP, dan Benih Jagung yang menyeret petani ke pengadilan telah menjadikan petani pada posisi yang semakin sulit untuk melindungi eksistensinya sebagai pelaku utama dalam memproduksi pangan, serta berbagai konflik atas hak pengusahaan lahan.

Untuk meningkatkan eksistensi petani dibutuhkan kesungguhan dan berkesinambungan, hal ini didasarkan pada kemampuan petani dalam mengakses dinamika eksternalnya. Berdasarkan data BPS dalam Achmad Suryana (2008), menunjukkan bahwa lebih dari 75% petani hanya memiliki pendidikan sampai tingkat dasar.

Tabel 3. Persentase dari Petani menurut Tingkat Pendidikan Formal di Indonesia

No	Tingkat Pendidikan	Jawa (%)	Luar Jawa (%)	Indonesia (%)
1	Tidak ada pendidikan	34,44	28,83	31,62
2	Hanya pendidikan dasar	48,07	41,93	44,98
3	Sekunder	15,80	27,56	21,71
4	Tersier	1,69	1,68	1,69
	Jumlah	100	100	100

Sumber: BPS dalam Achmad Suryana (2008)

Dengan tingkat pendidikan yang demikian terbatas perlu langkah-langkah strategi yang cepat, tepat dan terkoordinasi bagi *stakeholders* sehingga petani memiliki posisi yang kuat dalam pembangunan pertanian secara luas.

KONDISI PETANI DITENGAH KONFLIK GLOBAL

Selaras dengan Visi Pembangunan Pertanian 2025-2030: "Terwujudnya sistem pertanian industrial berkelanjutan yang berdayasaing dan mampu menjamin ketahanan pangan dan kesejahteraan petani", maka

salah satu orientasi dalam pembangunan pertanian adalah terciptanya kondisi petani yang sejahtera. Secara umum peningkatan kesejahteraan sangat dipengaruhi oleh bagaimana kondisi pendidikannya, seperti diketahui bahwa kualitas sumberdaya manusia di bidang pertanian sangat rendah, berdasarkan data pada Tabel 2 dan BPS (2006) menunjukkan bahwa 77% maksimum hanya tamatan SD, $\pm 27.8\%$ tidak menyelesaikan SD, 49.2% hanya tamat SD, 17% tamat SLTP, dan hanya 6% yang lulusan SLTA ke atas.

Dari sisi lahan garapah, dari total 17,04 juta ha lahan garapan untuk pertanian ketersediaan lahan per kapita 820 m² Sumarno dalam Didy Sopandie dan Aris Munandar (2008), sedangkan luas lahan potensial ± 32.2 juta ha, Adimihardja *et al.* dalam Didy Sopandie dan Aris Munandar (2008)

Tabel 4. Ketersediaan Lahan Garapan Dibeberapa Negara

No	Negara	Luas lahan per kapita (m ²)
1	Australia	26.100
2	Canada	14.870
3	Argentina	9.100
4	USA	6.150
5	Thailand	5.230
6	Brazil	3.450
7	India	1.510
8	China	1.120
9	Vietnam	960
10	Indonesia	820

Sumber: Didy Sopandie dan Aris Munandar (2008)

Dari Tabel 4, dapat dilihat bahwa dengan luas lahan 820 m², maka sulit petani dapat melakukan usaha secara mandiri sehingga dibutuhkan model lain untuk mempersatukan dalam mengakses ataupun menyampaikan aspirasinya berkaitan dengan usaha pertaniannya.

Perubahan lingkungan eksternal juga akan menentukan pola perilaku petani, respon petani dalam perubahan karakter ekonomi tradisional menjadi sistem pasar, menurut Scott, petani akan susah menerima perubahan karena mereka lebih mementingkan keamanan subsistensi (*safety first*) dan cenderung enggan risiko (*averse to risk*). Sedangkan Popkin menyatakan bahwa petani sebenarnya rasional, bila mereka berhubungan dengan pasar, mereka memiliki kemampuan untuk melakukan adaptasi. Kedua pendapat memberikan tanda bahwa petani akan melakukan respon terhadap perubahan eksternal tergantung pada kondisi dan situasi yang ada pada dirinya (internal).

Perilaku instan yang terjadi pada petani disebabkan oleh kondisi petani yang berada pada kondisi ketidakpastian yang tinggi, ketidakpastian merupakan persoalan klasik terutama pada kepastian produksi dan pasar dari hasil komoditasnya. Berbagai kasus yang muncul di berbagai daerah yang melibatkan petani banyak disebabkan oleh adanya kemungkinan-kemungkinan pada diri petani untuk menambah akses sumberdayanya (lahan, harga komoditi, modal, dsb). Petani akan selalu dihadapkan pada konflik dengan masyarakat yang berada pada lingkungan luar usaha pertaniannya, sehingga perlu strategi secara tepat dan berkesinambungan untuk memihak kepada petani sebagai pelaku utama dalam pembangunan pertanian.

REKAYASA KELEMBAGAAN PETANI UNTUK MENINGKATKAN HARGA DIRI, KEBERDAYAAN, DAN KEDAULATAN MASYARAKAT PETANI

Strategi Pembangunan Pertanian dengan adanya Revitalisasi Pembangunan Pertanian telah meletakkan konsep bahwa Strategi Pembangunan Pertanian yang Berawal dari Desa dengan Panca Yasa Sebagai Landasan Fundamental. Kelima hal tersebut adalah; 1). Pembangunan dan Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian, 2). Penguatan Kelembagaan Petani, 3). Revitalisasi Penyuluhan Pertanian, 4). Fasilitasi Pembiayaan Pertanian, 5). Nilai Tambah dan Penataan Pasar Produk Pertanian.

Konsep Panca Yasa sebenarnya sudah cukup luas memberikan ruang bagi pengembangan pertanian menyangkut keberadaan petani dan sektor pertanian itu sendiri. Salah satu tantangan dalam pembangunan pertanian adalah dengan membuat strategi untuk meningkatkan nasib petani dan pertanian Indonesia dengan membangun kelembagaan petani, perlu diingat bahwa bidang pertanian, perikanan dan kehutanan menyediakan pekerjaan bagi 43 juta orang (45% tenaga kerja nasional). Pembangunan kelembagaan petani yang selama ini terjadi lebih cenderung kurang konstruktif dan bahkan cenderung denstruktif. Hasil penelitian Saptana, Rosganda, dkk tahun (2003) menghasilkan simpul kritis transformasi kelembagaan menjadi tiga tahap transformasi kelembagaan tradisional di pedesaan

Tabel 5. Tahapan Perubahan dalam Transformasi Kelembagaan Tradisional

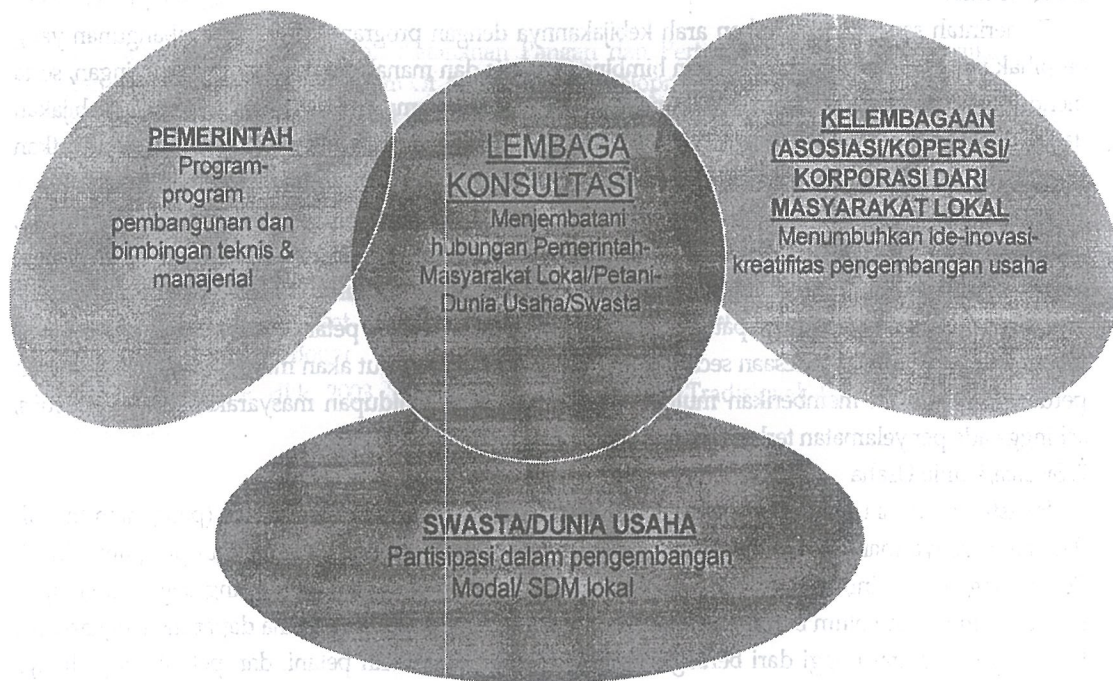
1. Tahap Masyarakat Komunal	2. Tahap Penghancuran Masyarakat Komunal	3. Tahap Komunalitas Baru (Model Transformasi Kelembagaan)
<p>Tipe masyarakat komunal merupakan ciri yang universal; ketergantungan penduduk masih tinggi dan campur tangan pihak luar masih rendah (masa sebelum 'era pembangunan', campur tangan pemerintah belum secara intensif); cirinya kepemilikan dan distribusi manfaat secara bersama, pengambilan keputusan penting masih dilakukan dengan merujuk tinggi prinsip kebersamaan (solidaritas), serta penetapan keputusan yang demokratis.</p> <p>Pembentukan lembaga yang dibutuhkan, mencakup struktur, pemilihan anggota, pola kepemimpinannya, penetapan keputusan yang demokratis, <i>rule of game</i> (aturan main) serta sanksi-sanksinya. (contoh: KAN -Karapatan Adat Nagari -di Sumatera Barat; <i>Subak</i> dan <i>Banjir</i> di Bali). Pada proses penyeragaman pemerintahan desa di Indonesia melalui UU No.5/1974 tentang pemerintahan desa, kelembagaan contoh tersebut tetap eksis, artinya dengan sedikit kelembagaan namun kaya dalam fungsi dan cakupannya</p>	<p>Invasi kekuatan terhadap masyarakat desa mulai terasa sejak 'era pembangunan' oleh pemerintah Orde Baru. Tanpa pengenalan dan pemahaman memadai pada masyarakat lokal, berbagai kelembagaan baru diintroduksi dengan struktur dan norma yang telah ditentukan. (contoh: koperasi/BUUD/KUD, LKMD, LMD).</p> <p>Kondisi ini bukannya memperkuat jaringan kelembagaan lokal, tapi justru merusak/menghancurkan kelembagaan lokal (terjadi gejala <i>banjir</i> kelembagaan, namun <i>mistin</i> fungsi) dan lebih sebagai <i>alat</i> untuk <i>mobilisasi sosial</i> dan memudahkan <i>kontrol</i> dari atas, sehingga terjadi <i>deformasi</i> kelembagaan lokal, bukan transformasi yang bersifat alamiah.</p>	<p>Pemerintah mulai merasakan timbulnya kesalahan dalam penetrasi kelembagaan yang tidak dibarengi pendekatan kultural (aspek kelembagaan), maka pemerintah mulai beralih dengan pendekatan baru yang lebih <i>menghargai</i> komunalitas lokal. Peran kepemimpinan lokal kembali direvitalisasi agar menjamin keberhasilan pembentukan kelembagaan introduksi. Kelembagaan LPD sebagai salah satu model kelembagaan transformasi/introduksi (mulai digerakkan tahun 1990-an) menunjukkan perkembangan yang baik (walau belum spektakuler), karena perannya mendukung perkembangan agribisnis (padi, palawija, hortikultura, perkebunan rakyat dan peternakan) di pedesaan. Kelembagaan koperasi dan lainnya mulai berusaha menjadi 'mandiri secara sesungguhnya', dengan tidak mengisolasi diri untuk berbagai kepentingan lain, yang secara sosiologis saling berkaitan dengan aspek sosial-ekonomi masyarakat pedesaan (agama, budaya, adat-istiadat dan sosial). Bahkan sejak era otonomi daerah, kebijakan pengelolaan kelembagaan oleh pemerintah berangsur-angsur beralih kepada masyarakat lokal yang secara rutin diberi bantuan, salah satunya berupa program BLM (walau belum mencukupi) untuk pembangunan sarana sosial umum yang mendukung program pembangunan pedesaan. Sudah saatnya konsep diversifikasi pertanian, industrialisasi pedesaan, dan pengembangan agribisnis dikembangkan menjadi program yang <i>nyata</i> dan <i>apikabel</i>, yang keseluruhannya harus lebih memperhatikan <i>faktor manusianya</i> atau <i>faktor sosiokulturalnya</i> (sehingga manusianya tidak bodoh, kurang pendidikan, tidak berjiwa entrepreneur dan hanya bementalitas subsisten belaka).</p> <p>Pemerintah perlu meningkatkan terus kualitas penduduk pedesaan sebagai sumberdaya ekonomi yang mampu berproduktivitas tinggi, serta menghidupkan kembali dan meningkatkan sisa-sisa bentuk kehidupan sosial pedesaan yang berdasar atas prinsip <i>guyub</i> (merupakan salah satu kelembagaan tradisional masyarakat lokal) yang masih ada.</p>

Sumber: Saptana, Rosganda E, dkk. (2003).

Dari tahapan tersebut menunjukkan bahwa banyak terjadi tumpang tindih akibat bentukan kelembagaan untuk kepentingan program tertentu ataupun dapat terjadi akibat kepentingan antarsektor

(ego-sektoral). Sebagai contoh banyak kelembagaan lokal yang mati karena tidak ada kuasa untuk menolak kelembagaan baru untuk kepentingan program, kemudian eksistensi nama (pelaku) usaha pertanian juga bermacam-macam, sebutan petani untuk sektor pertanian; peternak sebutan untuk sektor peternakan; pembudidaya ikan sebutan untuk sektor perikanan; dan sebagainya. Padahal, secara esensial mereka adalah pelaku kegiatan pertanian secara umum dengan berbagai macam jenis usaha (multi-profesi), sehingga mensejahterakan petani dengan beberapa pilihan, antara lain dengan dipadang sebagai insan multi sektor atau memperluas skala usahanya.

Sebagai upaya untuk menempatkan masyarakat petani (bukan petani secara individual) sebagai modal sosial (*social capital*) dapat dicapai dengan meningkatkan peran kelembagaan dengan melibatkan seluruh komponen yang merupakan bagian integral dari eksistensi petani. Keterbatasan baik internal (pendidikan, modal, kepemilikan sumberdaya, teknologi, dan sebagainya) dan eksternal (akses modal, teknologi, birokrasi, dan sebagainya) mengharuskan ada perubahan fundamental pada petani secara kelembagaan.



Gambar 1. Hubungan antar-komponen dalam Kemandirian Petani

Kelembagaan (Asosiasi/Koperasi/Korporasi) merupakan integrasi masyarakat berdasarkan pada kesamaan karakter yang tumbuh dari potensi lokal, sehingga dimensi sosialnya akan lebih menonjol dari pada dimensi ekonominya. Kekuatan sosial dengan kesamaan karakter (khususnya kepentingan ekonominya) akan memberikan ruang yang luas kepada masyarakat petani untuk meningkatkan kemampuan dengan sumberdaya yang ada dan kekuatan menghadapi kekuatan eksternal (terutama pasar).

Kelembagaan yang pro-petani merupakan sistem kelembagaan yang bertingkat dari petani → kelompok-kelompok tani → gabungan kelompok tani (Gapoktan) → Asosiasi/Koperasi/Korporasi dan terstruktur dari tingkat desa → kecamatan → kabupaten. Pengaturan kelembagaan petani diupayakan sebagai modal sosial dan kelembagaan bukan sekedar "papan nama" tetapi sebuah kelembagaan milik

petani, oleh petani dan untuk petani. Jika kelembagaan petani kuat maka akan memudahkan pola pengembangannya melalui: pendampingan, pelatihan, pengembangan teknologi, dan manajemen usaha. Kelembagaan petani untuk mengatasi kecenderungan berusaha sendiri-sendiri, sangat tergantung kepada bantuan pemerintah dan pelaku usaha lainnya, serta pertanian yang tidak efisien.

Kelembagaan petani diharapkan dapat mewujudkan dan menumbuhkan ide-inovasi-kreatifitas dan kemandirian petani dalam kegiatan usahatani. Hal ini akan merubah pola pendekatan yang sentralistik yang melemahkan kreatifitas petani ke pendekatan yang desentralistik yang menempatkan petani dan masyarakat petani sebagai yang paling mengetahui tentang sistem usahatani dan yang berkepentingan dengan permasalahan yang dihadapi. Kemandirian petani harus diciptakan, sehingga petani bukan sekedar penerima tetapi petani mampu mengembangkan (ide-inovasi-kreasi) dan belajar terus menerus dengan pendampingan secara teknis. Pendekatan untuk memandirikan petani harus didukung oleh berbagai komponen lain yang ada dilingkungan usahanya, komponen tersebut antara lain;

1. Pemerintah

Pemerintah sangat menentukan arah kebijakannya dengan program-program pembangunan yang berpihak pada kelembagaan petani dan bimbingan teknis dan manajerial dengan pendampingan, serta mendudukan petani dan kelompoknya pada posisi sentral dalam pembangunan pertanian. Kebijakan dapat dilakukan dengan berbagai regulasi yang menguatkan posisi petani, misalnya meningkatkan anggaran sektor Pertanian di APBN (seperti peningkatan anggaran 20% untuk pendidikan).

Peningkatan anggaran dapat digunakan untuk kebutuhan menciptakan teknologi (benih, pupuk, teknologi sosial lainnya), subsidi benih-pupuk, dan program lainnya, atau program benih-pupuk murah seperti halnya pada program pendidikan 9 tahun yang murah. Anggaran dilakukan untuk investasi dilakukan untuk dapat memberikan insentif kepada petani-masyarakat petani-sektor pertanian-dan wilayah perdesaan secara lebih luas. Kebijakan tersebut akan menggairahkan kehidupan perdesaan dan akan memberikan multiplier yang luas bagi kehidupan masyarakat yang lebih luas, sehingga ada penyelamatan terhadap sektor pertanian dan masyarakatnya.

2. Swasta/Dunia Usaha

Swasta dan dunia usaha berperan dan partisipasi dalam pengembangan modal (penguatan modal) dan sumberdaya manusia lokal (misalnya melalui *Corporate Social Responsibility* dan program lainnya). Peran yang selama ini, bahkan pada penyediaan input pertanian masih cenderung bagi kepentingan kapitalisasinya dan belum berpihak pada petani. Bahkan beberapa dunia usaha dapat menangkap nilai tambah yang sangat tinggi dari berbagai komoditas yang dihasilkan petani, dan petani hanya hanya dihargai sangat rendah dari kepemilikan lahan dan tenaga kerjanya dengan adanya pola-pola kemitraan.

3. Lembaga Konsultasi

Lembaga Konsultasi (konsultan) berperan dalam menjembatani hubungan Pemerintah-Masyarakat Lokal/Petani-Dunia Usaha/Swasta, hal ini dilakukan karena petani memiliki banyak keterbatasan, antara lain: perencanaan usaha, membuka hubungan/ kerjasama dengan pihak luar (berkait dengan aliran hulu-hilir produknya), dan sebagainya.

Untuk memberikan keluasan akses petani secara kelembagaan perlu adanya peran manager pendamping yang memiliki peran petani dalam merencanakan usaha, pendampingan usaha, mengidentifikasi kebutuhan pasar komoditas (misalnya analisis rantai pasar: spesifikasi komoditas sesuai kebutuhan pasar → hilir dan kualitas hasil yang harus dihasilkan oleh petani → hulu).

PENUTUP

Pemerintah seharusnya bertanggung terhadap kondisi masyarakat petani dalam meningkatkan harga diri, keberdayaan, dan kedaulatan dalam pilihan aktivitas usaha pertaniannya. Disamping itu secara internal perlu dilakukan peningkatan peran baik menggali kelembagaan lokal ataupun formulasi kelembagaan baru untuk meningkatkan harga diri, keberdayaan, dan kedaulatan dalam pilihan aktivitas usaha pertaniannya

Perlu perubahan paradigma segenap stakeholders yang selama ini berkepentingan menggunakan-membutuhkan jasa-jasa dari hasil komoditas pertanian. Hubungan yang ada harus menempatkan pada kedudukan yang seimbang (kekuatan yang setara) dan bukan hubungan patron-klien atau kedudukan yang menempatkan petani sebagai sub-ordinat dari kegiatan usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Suryana. 2008. Kebijakan Ketahanan Pangan dan Pertanian. Makalah disampaikan dalam Internasional Seminar: "Paradigm Of Agricultural Development: The Role and Synergy Between un Agencies, Government, NGO, and Privat Sectors" Joint Between Embassy of Republic of Indonesian in Rome and Gadjah Mada University. Yogyakarta.
- Didy Sopandie dan Aris Munandar. 2008. Pengembangan Perguruan Tinggi Pertanian Di Indonesia Menuju 2030. Makalah disampaikan pada Lokakarya Nasional Ke-8 FKPTPI Kerjasama FKPTPI dengan Fakultas Pertanian Universitas Jambi 27-29 Mei 2008.
- Roosgandha Elizabeth, Diagnosa Kemarjinalan Kelembagaan Lokal Untuk Menunjang Perekonomian Rakyat Di Pedesaan. Pusat Analisis Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian. Badan Litbang Departemen Pertanian Bogor .
- Saptana, Roosganda E, dkk. 2003. Transformasi Kelembagaan Tradisional. Laporan Hasil Penelitian. PSE. Bogor.